

**PERSEPSI AUDITOR PEMERINTAH MENGENAI
INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN
PENDETEKSIAN TINDAKAN KECURANGAN DI
SEKTOR PUBLIK**

(Studi Empiris pada BPK RI, BPKP RI, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

PRIMADHANI DYAH LARASATI SUYATNO

NIM. 12030113140256

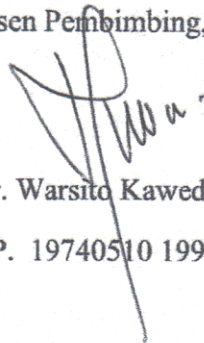
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Primadhani Dyah Larasati Suyatno
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140256
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PERSEPSI AUDITOR PEMERINTAH
MENGENAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN
TINDAKAN KECURANGAN DI SEKTOR
PUBLIK (Studi Empiris pada BPK RI,
BPKP RI, dan Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah)**
Dosen Pembimbing : Dr. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 31 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



(Dr. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt.)

NIP. 19740510 199802 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penulis : Primadhani Dyah Larasati Suyatno

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140256

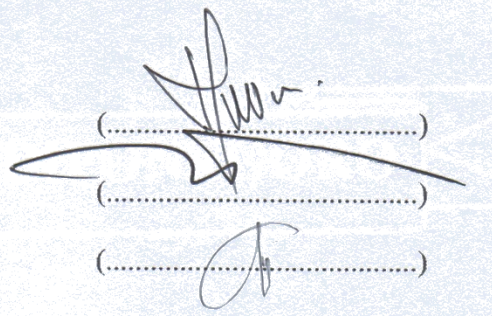
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PERSEPSI AUDITOR PEMERINTAH
MENGENAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN
TINDAKAN KECURANGAN DI SEKTOR
PUBLIK (Studi Empiris pada BPK RI,
BPKP RI, dan Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Juni 2017

Tim Penguji :

1. Dr. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt.
2. Dr. Jaka Isgiyarta, SE., M. Si., Akt
3. M. Didik Ardiyanto, M.Si., Akt



(.....)

(.....)

(.....)

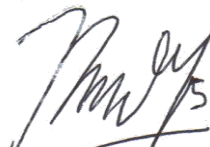
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Primadhani Dyah Larasati Suyatno, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Persepsi Auditor Pemerintah Mengenai Instrumen Pencegahan dan Pendeteksian Tindakan Kecurangan di Sektor Publik (Studi Empiris pada BPK RI, BPKP RI, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,



(Primadhani Dyah Larasati Suyatno)

NIM. 12030113140256

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pencegahan dan pendeteksian, pengendalian internal, kebijakan manajemen, dan integritas manajemen mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik. Tindakan kecurangan di sektor publik selama ini fokus diatasi ketika tindakan kecurangan tersebut telah terjadi, namun, upaya untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan sejak dini masih perlu ditingkatkan di seluruh instansi pemerintah untuk mengurangi biaya kerugian yang harus ditanggung negara akibat adanya tindakan kecurangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada auditor yang bekerja pada BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pencegahan dan pendeteksian serta pengendalian internal berpengaruh terhadap tindakan kecurangan di sektor publik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, metode pencegahan dan pendeteksian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan kecurangan. Pengendalian internal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan kecurangan. sementara, variabel kebijakan manajemen dan integritas manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan kecurangan. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan dapat diminimalisir dengan pengendalian internal.

Kata kunci :Metode pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan, pengendalian internal, kebijakan manajemen, integritas manajemen.

ABSTRACT

This study aims to determine the methods of prevention and detection, internal control, management policies, and management integrity affect fraud in the public sector. Fraud in the public sector have been focused on when these fraudulent acts have taken place, however, efforts to prevent and detect fraudulent acts from an early appear need to be improved across government agencies to reduce the cost of losses to the state due to fraud.

This research was conducted by quantitative method by spreading questionnaires to auditors who working on BPK, BPKP, and Inspectorate of Central Java Province. Analyzer to test the influence between independent variable toward dependent variable in this research by using multiple linear regression analysis.

The results showed that prevention and detection method and internal controls had an effect on fraud in the public sector. Based on the results of the analysis, prevention and detection methods have a positive and significant influence on fraud. Internal control has a negative and significant influence on fraud. However, management policies and management integrity variables have no significant effect on fraud. So it can be concluded that the act of fraud can be minimized by internal control.

Keywords: Fraud prevention and detection methods, internal controls, management policies, management integrity

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Persepsi Auditor Pemerintah Mengenai Instrumen Pencegahan dan Pendeteksian Tindakan Kecurangan di Sektor Publik (Studi Empiris pada BPK RI, BPKP RI, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril maupun material serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan inspirasi, membimbing, meluangkan waktu, dan motivasi bagi penulis.

3. Dr. Paulus Th. Basuki Hadiprajitno, SE, MBA, MSA, Akt. selaku Dosen Wali dari penulis.
4. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik, memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan yang tak ternilai.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Yunita dan Bondan atas kerjasamanya dari awal masuk kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menemani dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, dukungan, doa, motivasi, dan hiburannya.
7. Teman-teman BPMAI dan MIZAN yang dipertemukan dalam organisasi hingga menjadi keluarga, terimakasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka menjalankan berbagai acara, mengajak main dikala sedang penat dan memberikan dukungan.
8. Nugraha, Fahmi, Mba Rindhita, dan Kak Haikal atas semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan sudah bersedia mengajari penulis dalam mengolah data.
9. Mbak Mila dan Mas Widi atas inspirasi dan motivasinya untuk melanjutkan studi hingga S3 di Cina, serta teman-teman PPBIC atas dukungan dan semangatnya untuk terus belajar bahasa mandarin.
10. Sahabat – sahabatku dari SD hingga SMA khususnya Elita dan Fathiyah atas dukungan, doa, kerjasama dalam menjalankan acara sosial tahunan, dan menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati. Semoga kita dapat meraih menara impian kita masing- masing (*liberty, bigben, dan eiffel*).

Sahabat hidup selama KKN di Desa Banyumanis atas dukungan, saran, dan kerjasamanya yang tiada henti. Terimakasih khususnya untuk Mas Mimi yang sudah banyak mengibur, memberi petuah, dan mentraktir durian sekarang saat KKN.

11. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2013 dan kakak tingkat atas kerjasama, bantuan dan dukungannya selama kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
12. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis atas pelayanannya selama kuliah.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis menerima segala saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan siapapum yang membutuhkan skripsi ini.

Semarang, April 2017

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. dan hanya kepada Tuhanmu, kamu berharap (QS Al Insyirah:6-8)

Jangan biarkan keterbatasan membuatmu tidak mampu berbuat lebih dari yang orang lain pikirkan. Let's break the limits! (Budi Waluyo)

Tidak apa sering sakit hati, dilupakan, dan ditinggalkan. Banyak orang besar lahir dari sakit hati. Tidak masalah sering dihina dan dicaci. Banyak orang mulia lahir dari seluruh penghinaan dan cacian. Pastikan saja, kita selalu bergerak menjadi lebih baik, belajar dari sakit hati dan hinaan orang lain. (Tere Liye)

Keep Smile!

Karya tulis ilmiah ini kupersembahkan kepada

Mama, Papa, adik-adik,

keluarga besar, sahabatku, dan almamaterku tercinta.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Atribusi.....	12
2.1.2 <i>Albrecht Theory</i>	13
2.1.3 Persepsi.....	14

2.1.4	Kecurangan.....	16
2.1.4.1	Definisi Kecurangan.....	16
2.1.4.2	Skema Kecurangan.....	17
2.1.4.3	Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan.....	19
2.1.5	Metode Pencegahan dan Pendeteksian.....	20
2.1.6	Pengendalian Internal.....	22
2.1.7	Kebijakan Manajemen.....	23
2.1.8	Integritas Manajemen.....	27
2.2	Penelitian Terdahulu.....	28
2.3	Kerangka Pemikiran.....	33
2.4	Perumusan Hipotesis.....	34
2.4.1	Pengaruh Metode Pencegahan dan Pendeteksian terhadap Tindakan Kecurangan.....	34
2.4.2	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tindakan Kecurangan.....	35
2.4.3	Pengaruh Kebijakan Manajemen terhadap Tindakan Kecurangan.....	36
2.4.4	Pengaruh Integritas Manajemen terhadap Tindakan Kecurangan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	38
3.1.1	Variabel Penelitian.....	37
3.1.2	Definisi Operasional.....	39

3.1.2.1	Tindakan Kecurangan.....	39
3.1.2.2	Metode Pencegahan dan Pendeteksian.....	39
3.1.2.3	Pengendalian Internal.....	40
3.1.2.4	Kebijakan Manajemen.....	41
3.1.2.5	Integritas Manajemen.....	41
3.2	Penentuan Populasi, Sampel dan Teknik Sampel.....	41
3.2.1	Populasi Penelitian.....	41
3.2.2	Sampel Penelitian.....	42
3.2.3	Teknik Sampel.....	42
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5	Metode Analisis.....	44
3.5.1	Uji Deskriptif.....	44
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	45
3.5.2.1	Uji Validitas.....	45
3.5.2.2	Uji Reliabilitas.....	45
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.5.3.1	Uji Normalitas.....	46
3.5.3.2	Uji Multikolinearitas.....	47
3.5.3.3	Uji Heteroskedasitas.....	47
3.5.3.4	Uji Korelasi.....	48
3.5.4	Analisis Regresi.....	49
3.5.4.1	Koefisien Determinasi.....	49

3.5.4.2 Uji Signifikan Simultan.....	49
3.5.4.3 Analisis Regresi Berganda.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	51
4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
4.1.2 Gambaran Umum Responden.....	53
4.2 Hasil dan Analisis Data.....	55
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	55
4.2.2 Uji Kualitas Data.....	68
4.2.2.1 Uji Validitas.....	68
4.2.2.2 Uji Reliabilitas.....	70
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	71
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	71
4.2.3.2 Uji Multikolonieritas.....	73
4.2.3.3 Uji Heteroskedasitas.....	74
4.2.3.4 Uji Korelasi.....	77
4.3.3 Analisis Regresi.....	78
4.3.3.1 Koefisien Determinasi.....	78
4.3.3.2 Uji Signifikansi Simultan.....	79
4.3.3.3 Hasil Regresi Berganda.....	80
4.4 Pembahasan Hasil Hipotesis.....	82
4.4.1 Pengaruh Metode Pencegahan dan Pendeteksian terhadap Tindakan Kecurangan.....	83

4.4.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tindakan	
Kecurangan.....	85
4.4.3 Pengaruh Kebijakan Manajemen terhadap Tindakan	
Kecurangan.....	88
4.4.4 Pengaruh Integritas Manajemen terhadap Tindakan	
Kecurangan.....	91
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Simpulan.....	93
5.2 Keterbatasan.....	94
5.3 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Data Distribusi Penyebaran Sampel Penelitian.....	52
Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden.....	54
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Tindakan Kecurangan.....	56
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Persepsi Temuan Tindakan Kecurangan Setiap Instansi.....	57
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Metode Pencegahan dan Pendeteksian.....	60
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Pengendalian Internal.....	63
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Kebijakan Manajemen.....	64
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Integritas Manajemen.....	66
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas.....	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	70
Tabel 4.12 Hasil Skewness dan Kurtosis.....	73
Tabel 4.13 Perbandingan Nilai Zskewness dan Zkurtosis.....	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolonieritas.....	74
Tabel 4.15 Hasil Uji White.....	76
Tabel 4.16 Hasil Uji Korelasi.....	77
Tabel 4.17 Koefisien Determinasi.....	78
Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik F.....	79

Tabel 4.18 Hasil Regresi Berganda.....	80
Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sistem Kendali Kecurangan (SI Kencur).....	26
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	72
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi swasta maupun pemerintah saat mengelola keuangan tidak terlepas dari tindakan kecurangan. Indikasi terjadinya kecurangan dapat diketahui melalui pengungkapan penyajian pada laporan keuangan yang berbeda dari kondisi yang sebenarnya dan dilakukan secara sengaja oleh pelaku kecurangan dan tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara illegal atau untuk mendapatkan informasi yang tidak seharusnya sehingga tindakan kecurangan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan laporan *Report to the Nation* (RTTN) yang dihasilkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) melaporkan jumlah kecurangan yang berhasil terinvestigasi mulai bulan Januari 2014 hingga Oktober 2015 yaitu sebesar 2.410 kasus kecurangan di dunia.

ACFE mendefinisikan kecurangan (*fraud*) pada penyalahgunaan kerja (dikutip oleh Singleton, 2010) dengan cara menggunakan pekerjaan seseorang untuk keuntungan pribadi secara sengaja atau pencurian sumber daya atau aset organisasi. ACFE juga mendefinisikan penipuan laporan keuangan sebagai kekeliruan yang disengaja pada kondisi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menipu pemakai laporan keuangan melalui penyimpangan dalam pengungkapan laporan keuangan yang disengaja atau kelalaian dari jumlah pada laporan keuangan. Dengan demikian, ACFE mengelompokkan kecurangan yang terjadi di organisasi menjadi tiga skema

kecurangan yang meliputi (1) penyalahgunaan aset, (2) kecurangan laporan keuangan, dan (3) korupsi.

Penyalahgunaan aset (*aset missappropriation*) biasanya dilakukan oleh karyawan dan paling sering umum terjadi (frekuensi) akan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang material. Karena kecurangan pada penyimpangan aset cenderung tidak material, transaksi individu dalam melakukan kecurangan ini sulit untuk dideteksi oleh auditor keuangan ketika melakukan audit keuangan reguler. Jenis kecurangan kedua yaitu pemalsuan laporan keuangan (*fraudulent statement*). Bentuk kecurangan yang merupakan perbuatan manajemen organisasi tingkat atas melalui manipulasi laporan keuangan melalui penyembunyian atas kondisi keuangan yang sebenarnya untuk memperoleh keuntungan. Jenis kecurangan yang ketiga yaitu korupsi yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah skema seperti penyuapan dan pemerasan, yang biasanya melibatkan orang dalam entitas yang bekerjasama dengan pihak luar entitas, meskipun terkadang salah satunya tidak bermaksud untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam praktik korupsi melibatkan pihak terkait sehingga hubungan ini sulit untuk dideteksi (misalnya kasus proyek Hambalang yang melibatkan menteri olahraga, politisi dan Direktur PT Dutasari Citralaras dan lain sebagainya). Skema kecurangan yang paling banyak terjadi pada tahun 2016 menurut hasil survei RTTN yaitu penyalahgunaan aset sebesar 83,5 persen. Kemudian disusul kasus korupsi sebesar 35,4 persen dan manipulasi laporan keuangan sebesar 9,6 persen. Walaupun skema kecurangan dalam manipulasi laporan keuangan paling sedikit jumlahnya, akan tetapi, kerugian yang ditimbulkan paling besar yaitu sebesar \$975.000 menurut laporan RTTN tahun 2016.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang merupakan kepercayaan masyarakat dalam mengelola keuangan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam praktiknya tidak terlepas dari kasus kecurangan. Berdasarkan hasil survei *Transparency International* (TI) pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat persepsi indeks korupsi ke 88 dari 168 negara. Hal itu menandakan transparansi pada sektor publik di Indonesia masih sangat rendah sehingga masih dibutuhkan peran dari auditor untuk menangani kasus korupsi yang belum terselesaikan dan semakin meningkat setiap tahunnya. Penipuan sektor publik adalah di mana pelaku berusaha untuk mengeksploitasi hibah pemerintah dan kompensasi untuk keuntungan pribadi. Jenis kecurangan yang sering terjadi pada sistem pemerintahan di Indonesia diantaranya yaitu *markup* pengadaan barang, pemberian gratifikasi, penggelapan aset, kegiatan/acara fiktif, pengaturan lelang yang tidak sesuai, pungutan liar, kurangnya volume/spektrum dalam pembangunan proyek, gaji/honor fiktif, dan penggelapan kas bendahara pemerintah.

Keahlian atau kompetensi seorang auditor sangat diperlukan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Dalam merespon tindakan kecurangan, mencari atau mengungkapkan kecurangan, seorang auditor dituntut untuk kreatif dan intuitif (Vona, 2008) dalam Kartikarini dan Sugiarto(2016). Sikap auditor dalam mempertanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan gejala-gejala adanya kecurangan sangat diperlukan. Sikap skeptisisme profesional yang tinggi dibutuhkan oleh Auditor untuk mengidentifikasi perilaku kecurangan dan mencari bukti tambahan terkait penipuan. Shaub dan Lawrence (1996) dalam Omar et al. (2005)

menemukan bahwa keberadaan pihak terkait transaksi dan klien yang tunduk pada tekanan keuangan karena adanya faktor-faktor lain yang mengakibatkan peningkatan skeptisisme pada auditor. Auditor yang memiliki pengalaman dan ketrampilan dalam mengatasi kecurangan menjadi lebih skeptif. Standar audit juga mengharuskan auditor untuk meningkatkan skeptisisme mereka dan mengesampingkan setiap keyakinan sebelumnya bahwa manajemen jujur (AICPA 2002, ayat 14). Auditor diwajibkan menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan hasil audit. Perwujudan keahlian profesional auditor berkaitan dalam mempertimbangkan pembuatan keputusan selama pemeriksaan (Simamora, 2002). *Statement on Auditing Standards (SAS)* Nomor 99 juga mensyaratkan auditor untuk memahami penipuan, mendiskusikan salah saji kecurangan yang material, memperoleh informasi, mengidentifikasi, menilai dan merespon resiko, mengevaluasi hasil pengujian audit mereka, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan, serta menggabungkan fokus teknologi. Tersirat dalam persyaratan tersebut, bahwa jika seorang auditor harus lebih skeptis tentang kemungkinan adanya penipuan dalam deteksi kecurangan, sehingga penipuan yang akan terjadi dapat diperbaiki (Fullerton, 2004). Maka dari itu, peningkatan skeptisisme profesional dapat bermanfaat dalam pendeteksian dini terhadap penipuan.

Beberapa kasus kecurangan yang terjadi menyebabkan auditor internal dan auditor eksternal mengembangkan teknik dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Audit regular masih dirasa kurang dalam pencegahan kecurangan karena hanya mengaudit kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang ditetapkan dan pengambilan sampel audit dilakukan secara acak sehingga sampel

yang terdapat kecurangan tidak dapat terdeteksi, maka dari itu dalam mendeteksi kecurangan diperlukan audit investigatif untuk menemukan bukti-bukti terhadap kasus kecurangan. Pencegahan terhadap kecurangan merupakan cara yang lebih baik dalam mengatasi kecurangan seperti yang dikatakan Dye (2007) dalam Kartikarini dan Sugiarto(2016) menyatakan bahwa melakukan pencegahan terhadap kecurangan lebih baik dibandingkan dideteksi.

Demi mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan profesional di dalam sektor publik di Indonesia, terdapat dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa terhadap penyelenggaraan negara baik tingkat pusat maupun daerah. Lembaga tersebut yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP tersebut mencakup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat masing-masing kementerian, dan Inspektorat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Terdapat perbedaan tujuan antara BPK dengan APIP. BPK sebagai auditor eksternal pemerintah memiliki tujuan untuk menguji kehandalan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dengan memberikan keyakinan yang memadai. Selain itu, menguji kehandalan Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan perundang-undangan. Sedangkan APIP memiliki tujuan dalam mengendalikan proses bisnis manajemen untuk memastikan sesuai dengan prosedur dan visi dan misi.

Selain membentuk badan yang bertugas mengawasi dan memeriksa keuangan negara, Pemerintah Indonesia juga membuat Lembaga Pengaduan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai tempat pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku (*justice collaborator*), dan ahli untuk melakukan pengaduan terhadap pelaku yang melakukan

tindak pidana. Dasar hukum LPSK diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh BPK tahun 2016 terhadap 640 laporan keuangan, menemukan 10.198 kasus yang mencakup 15.568 penyimpangan yang terdiri atas 7.661 pengendalian internal yang lemah dan 7.907 permasalahan perundang-undangan yang tidak ditaati senilai Rp 44,68 triliun. Besarnya jumlah permasalahan mengenai pengendalian internal yang lemah dan perundang-undangan yang tidak ditaati yang ditemukan oleh BPK merupakan faktor yang dapat menimbulkan kecurangan yang diakibatkan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kelemahan SPI dan kurangnya kebijakan manajemen yang ada di sektor publik. Tindakan kecurangan tersebut tidak akan terjadi apabila pengendalian internal dan kebijakan manajemen dapat berjalan efektif. Pengendalian internal dan kebijakan manajemen tidak akan berjalan efektif tanpa adanya integritas yang dimiliki oleh setiap pegawai di sektor publik. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis pengendalian internal, kebijakan manajemen, dan integritas manajemen pada instansi pemerintah dalam meningkatkan pencegahan terhadap kecurangan menurut persepsi auditor eksternal dan internal pemerintah.

Selain itu, selama ini fokus pemerintah hanya melakukan penindakan ketika kecurangan tersebut muncul. Padahal Kecurangan tidak akan selesai tanpa adanya pemutus rantai kecurangan. Hery Subowo (2016) menjelaskan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan tindakan kecurangan tidak kunjung selesai diantaranya disebabkan oleh temuan tindakan kecurangan relatif berulang dengan

modus yang lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak pihak, kebijakan pengendalian kecurangan dari Pemerintah lebih fokus kepada penindakan (Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2011), Pimpinan entitas kurang peduli terhadap upaya pengendalian kecurangan, serta tanggungjawab pencegahan dan pendeteksian kecurangan cenderung dibebankan pada fungsi audit. Alasan tersebut menjadikan badan yang bertugas memeriksa dan mengawasi keuangan negara melakukan berbagai tindakan preventif dalam mencegah kecurangan. Demi mewujudkan upaya pencegahan terhadap kecurangan dapat berjalan efektif, dibutuhkan kerjasama dari berbagai *stakeholder* dan tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara saja. Menurut Jaspian dan Black dalam Singleton (2010), terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan kecurangan. Langkah-langkah tersebut meliputi: (1) membayar karyawan secara cukup, (2) memperlakukan karyawan dengan sopan, (3) mendengarkan masalah karyawan mereka. Tapi jangan menaruh kepercayaan penuh pada karyawan atau personil keamanan yang memeriksa mereka. Selain itu untuk mengatasi kecurangan menurut W. Steve Albrecht dalam Sudarmo, dkk (2008) terdapat empat cara dalam memberantas kecurangan meliputi (1) pencegahan kecurangan, (2) pendeteksian kecurangan, (3) investigasi kecurangan, dan (4) penegakan hukum. Pada penelitian ini penulis juga menguji metode pencegahan dan pendeteksian kecurangan menurut persepsi auditor di BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai metode pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah. Peraturan mengenai pengendalian internal telah dibuat di dalam peraturan pemerintah, serta partisipasi instansi pemeriksa seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat juga turut andil dalam mengevaluasi kebijakan manajemen di instansi pemerintah. Namun, sampai saat ini tindakan kecurangan masih banyak terjadi. Permasalahan penelitian yang ingin dijawab adalah :

- 1 Apakah metode pencegahan dan pendeteksi dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik?
- 2 Apakah pengendalian internal dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik?
- 3 Apakah kebijakan manajemen dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik?
- 4 Apakah integritas manajemen dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian bertujuan untuk menganalisis instrumen pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan. Adapun tujuan khusus adalah:

1. Untuk menganalisis metode pencegahan dan pendeteksian dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik.
2. Untuk menganalisis pengendalian internal dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik.

3. Untuk menganalisis kebijakan manajemen dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik.
4. Untuk menganalisis integritas manajemen yang dimiliki instansi pemerintah dapat mempengaruhi tindakan kecurangan di sektor publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah bahan referensi bagi perkembangan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini berguna dalam mempersiapkan lulusan mahasiswa yang sadar terhadap skandal kecurangan yang akan terjadi di dunia kerja nantinya sehingga dapat menghindari perilaku yang tidak etis dalam berkarir.
3. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang diterapkan oleh sektor publik, yang mana dalam pelaksanaannya apakah sudah efektif dalam pencegahan dan deteksi penipuan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pembenahan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.
4. Bagi mahasiswa, penelitian ini dijadikan bahan bacaan dan sebagai informasi penerapan *good governance* pada pencegahan dan deteksi penipuan di instansi pemerintah, dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mewujudkan penurunan tindakan kecurangan di Indonesia dan menerapkan perilaku yang bermoral dimanapun berada.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan teori atribusi, persepsi, teori Albrecht, kecurangan serta metode pencegahan dan deteksi kecurangan. Adapun terdapat penelitian-penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data penelitian, dan pengolahan data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang deskripsi responden penelitian yang dilakukan di BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi, serta hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Provinsi maupun bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini.